

# LIMA PEKAN BPK PEMERIKSAAN, TINDAKLANJUTI TEMUAN USAI LEBARAN



LALU GITA ARIADI

Selama lima pekan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penggunaan anggaran di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB, mulai dari entry meeting hingga exit meeting. "Kami sudah melakukan exit meeting dengan BPK, dan mereka memberikan gambaran kepada pemprov terkait sejumlah temuan yang harus kita atensi," terang Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Rabu (26/3).

Temuan BPK didominasi oleh kurang tertibnya administrasi tata kelola anggaran. Di Dinas Dikbud NTB, BPK menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang tertib administrasi. Di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB ditemukan adanya kelebihan pembayaran paket pekerjaan. Sementara di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, administrasi dalam kegiatan inseminasi buatan kurang tertib.

Di Dinas PUPR NTB, Gita menjelaskan perkembangan rehabilitasi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center yang mengalami keterlambatan. Hingga kini, lift sebagai komponen terakhir pekerjaan belum tiba di NTB. "Informasi terakhir yang saya dapatkan, liftnya masih di Surabaya dan belum bisa dikirim karena tingginya arus mudik. Tetapi kita terus upayakan, jika sudah dipasang, pekerjaan ini selesai 100 persen," jelas Gita.

BPK juga menyoroti molornya pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Mandalika. Namun, Gita tidak dapat merinci lebih lanjut karena dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Lalu Hamzi Fikri absen. Terkait keterlambatan proyek, Gita mengakui ada usulan untuk memutus kontrak. "Kita masih mengkaji dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, apakah kontraktor diberikan kesempatan melanjutkan dengan denda atau diputus kontraknya," paparnya.

BPK juga meminta pemprov lebih tertib dalam akuntabilitas belanja perjalanan dinas. Gita mencontohkan perjalanan dinas dari Mataram ke Bima, di mana lokasi desa yang dituju sangat jauh dan harus diakses dengan kuda atau perahu. Dalam hal ini, pemprov biasanya melakukan penyewaan, dan BPK meminta regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) diperbaiki.

Semua temuan tersebut akan ditindaklanjuti setelah Lebaran. Gita memastikan bahwa setiap OPD telah mengetahui letak masalah serta solusinya. "Jika ada temuan keuangan yang berakibat pada pengembalian, saya sudah perintahkan kepala OPD untuk mengenali masalahnya, serta menentukan langkah selanjutnya, apakah kesalahan ada di pemerintah atau di penyedia jasa, dan bagaimana komitmen penyedia jasa dalam menyelesaikan masalah ini," tandasnya.

# LIMA PEKAN BPK PEMERIKSAAN, TINDAKLANJUTI TEMUAN USAI LEBARAN



LALU GITA ARIADI

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Ervan Anwar menegaskan, ada dua jenis pemeriksaan keuangan oleh BPK. Pemeriksaan untuk OPD disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan pemeriksaan khusus untuk RSUP NTB disebut Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang biasanya bertujuan mengungkap indikasi kerugian keuangan serta unsur pidana. (yun/r7)